

Violence Case Reporting and Information Service Application to Support the PPKPT Task Force Program

Aplikasi Layanan Informasi Dan Pelaporan Kasus Kekerasan Untuk Mendukung Program Satgas PPKPT

Imam Ajie Pradana¹, Arfhan Prasetyo^{2*},
Instianti Elyana³, Rangga Ramadhan Saelan⁴

Program Studi Informatika^{1,2}, Manajemen³, Sains Data⁴
Teknologi Informasi^{1,2,4}, Ekonomi dan Bisnis³
Universitas Nusa Mandiri^{1,2,3,4}

Correspondent Author: arfhan.prasetyo@gmail.com²

Authors Email: aji2207ok@gmail.com¹,
instianti.iny@nusamandiri.ac.id³,
rangga.mgg@nusamandiri.ac.id⁴

Received: March 13, 2026. **Revised:** April 28, 2026. **Accepted:**
May 12 2026. **Issue Period:** Vol.10 No.2 (2026), Pp. 613-627

Abstrak: Peningkatan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi adanya sistem mitigasi yang responsif sesuai dengan permendikbudristek nomor 55 tahun 2024. Penelitian ini merancang aplikasi layanan informasi berbasis web untuk Satgas PPKPT Universitas Nusa Mandiri menggunakan pendekatan yang terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, *desain*, *pemrograman*, dan pengujian. Penerapan metode XP untuk memberikan fleksibilitas dalam memetakan bentuk kekerasan. Sistem ini mengintegrasikan fitur utama berupa formulir pengaduan online yang aman, edukasi publikasi kegiatan, dan layanan informasi kebijakan. Pengujian sistem dilakukan melalui *Performance Testing* menggunakan *Apache JMeter*, Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) dan Pengujian Integrasi Sistem (SIT). Hasil pengujian performa menunjukkan rata-rata tingkat keberhasilan akses sebesar 90% dengan rata-rata waktu respon 248 milidetik. Hasil UAT mengonfirmasi bahwa sistem mampu memfasilitasi pelaporan yang anonim dan efisien, Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat meningkatkan keterjangkauan layanan SATGAS sekaligus menjamis keamanan data pelapor di lingkungan kampus. sehingga meningkatkan keterjangkauan layanan Satgas di lingkungan kampus.

Kata kunci: *Extreme Programming*, Mitigas Kekerasan, satgas PPKPT, Layanan Informasi

Abstract: The increasing incidence of violence within higher education institutions necessitates the implementation of a responsive mitigation system in accordance with Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. This study aims to design a web-based information service application for the Task Force for the Prevention and Handling



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2408

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

of Violence in Higher Education (PPKPT) at Universitas Nusa Mandiri. The development process adopts a structured approach consisting of several stages, namely planning, design, programming, and testing. The Extreme Programming (XP) method is implemented to provide flexibility in mapping various forms of violence. The system integrates key features, including a secure online complaint form, educational content and activity publication, as well as policy information services. System testing is conducted through performance testing using Apache JMeter, User Acceptance Testing (UAT), and System Integration Testing (SIT). The performance testing results indicate an average access success rate of 90%, with an average response time of 248 milliseconds. The UAT results confirm that the system is capable of facilitating anonymous and efficient reporting. This study concludes that the application enhances the accessibility of Task Force services while ensuring the security of reporters' data within the campus environment, thereby improving the overall reach and effectiveness of PPKPT services.

Keywords: *Extreme Programming, Violence Mitigation, PPKPT Task Force, Information Services*

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan secara paksa oleh seseorang terhadap individu lain yang mencakup elemen seksual, bertujuan untuk menguasai, menghukum, atau memenuhi keinginan si pelaku. Tindakan ini bisa berupa kontak fisik yang tidak diinginkan, pernyataan seksual yang merendahkan, sampai penetrasi. Kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan di berbagai tempat. Para korbannya bisa berasal dari berbagai usia dan kelompok. Konsekuensi yang ditimbulkan juga dapat bertahan lama, bahkan seumur hidup.[1][2].

Catatan Tahunan (CATAHU) yang dirilis oleh Komnas Perempuan dikeluarkan setiap tahun dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret. Data mengenai kekerasan CATAHU tahun 2023 dalam sektor pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar korban yang melaporkan kepada lembaga layanan berasal dari latar belakang SMA dengan total 1.721 kasus dan dari Perguruan Tinggi sebanyak 892 kasus. Selain itu, mayoritas pelaku kekerasan memiliki latar belakang pendidikan SMA sebanyak 1.582 kasus dan pendidikan tinggi sebanyak 791 kasus. [3].

Lingkungan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman, sering kali tidak terhindar dari berbagai macam tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual, fisik, dan mental. Kemendikbudristek sebelumnya telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan Tinggi (PPKS). Dengan adanya regulasi ini, mendorong terjadinya pelaporan atas kasus-kasus kekerasan seksual dan kekerasan lainnya, Kemendikbudristek telah mencatat 310 laporan kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan tinggi, yang terdiri dari, Kekerasan seksual (49,7%), Perundungan (38,7%), dan intoleransi (11,6%)..[2]

Penelitian sebelumnya telah berfokus pada pengembangan sistem pengaduan kekerasan seksual, seperti aplikasi mobile HiCare yang menggunakan framework Flutter dan sistem informasi di Universitas Maritim Raja Ali Haji Namun, platform-platform tersebut masih bersifat spesifik pada satu jenis kekerasan.[4] Seiring dengan diundangkannya Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, perguruan tinggi kini diwajibkan untuk menangani cakupan kekerasan yang lebih luas, mencakup enam bentuk kekerasan termasuk perundungan, intoleransi, hingga kebijakan diskriminatif[5]. Berdasarkan hasil kajian implementasi peraturan tersebut maka Kemendikbudristek melihat perlunya mendorong lembaga pendidikan tinggi, khususnya Universitas Nusa Mandiri, untuk membentuk SATGAS PPKPT dalam menangani laporan mengenai kasus kekerasan seksual. Namun, eksistensi tim ini harus didukung dengan fasilitas yang memudahkan mahasiswa, dosen, dan staf kampus untuk melaporkan insiden serta



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2408

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

mendapatkan informasi yang relevan. Sebuah aplikasi layanan berbasis web diharapkan dapat memberikan informasi dan jalur pengaduan yang aman serta ramah pengguna sambil menjaga kerahasiaan korban dan saksi[6].

Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini hadir sebagai solusi digital pertama yang mengimplementasikan standar Satgas PPKPT sesuai regulasi terbaru, mengisi celah kebutuhan teknologi informasi yang mampu menjamin keamanan pelapor di berbagai lokasi kegiatan akademik didalam maupun di luar kampus. Kebaruan metodologis dalam penelitian ini terletak pada penerapan metode *Extreme Programming* (XP) yang lebih fokus pada aspek *engineering* dibandingkan model manajemen seperti Scrum . Penggunaan XP memberikan fleksibilitas tinggi dalam memetakan enam bentuk kekerasan baru sesuai mandat regulasi terkini.[7]

II. METODE DAN MATERI

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berusaha menerapkan teori melalui metode-metode berikut: Observasi, yang melibatkan pengamatan langsung terhadap cara manajemen kampus menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di area kampus. Wawancara, di mana dilakukan interaksi secara langsung dengan anggota komunitas akademik, khususnya individu yang mengalami kekerasan, serta wawancara dengan petugas PPKPT atau yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas PPKS. Terakhir, Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan serta internet, termasuk dokumen dan jurnal yang relevan dengan isu yang dibahas.[6]. Melalui proses ini, diidentifikasi tiga aktor utama dengan peran spesifik: User sebagai pelapor, Admin sebagai tim penanganan kasus, dan Staff sebagai tim pencegahan yang mengelola konten edukasi.

Model pembangunan sistem yang digunakan oleh penulis adalah model Extreme Programming. Model Extreme Programming, yang kerap disebut XP, adalah jenis model pengembangan perangkat lunak yang membuat proses pembangunan sistem menjadi lebih efektif, responsif, dan lincah. XP tidak hanya tertuju pada pengkodean tetapi juga mencakup seluruh aspek dari pengembangan perangkat lunak.[7].

Tahapan dalam pendekatan pengembangan sistem XP mencakup Perencanaan, yang menjadi langkah pertama dalam proses pembangunan sistem. Ada beberapa aktivitas perencanaan, termasuk pengenalan masalah, analisis kebutuhan, hingga penjadwalan pelaksanaan pembangunan sistem. Perancangan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemodelan, di antaranya mencakup pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, dan pemodelan basis data. Untuk pemodelan sistem dan arsitektur diterapkan diagram Unified Modelling Language (UML), sementara pemodelan basis data mengadopsi Entity Relationship Diagram (ERD).[6]. Pengkodean adalah proses implementasi desain membuatnya ke dalam bentuk antarmuka pengguna menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipilih untuk digunakan adalah *PHP* dengan pendekatan terstruktur. Sedangkan untuk sistem manajemen basis data, digunakan perangkat lunak *MySQL*. Di sisi lain, pengujian adalah tahap evaluasi sistem untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi selama aplikasi beroperasi serta memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pengguna..

Kebaruan metodologis dalam penelitian ini terletak pada penerapan metode *Extreme Programming* (XP) yang lebih fokus pada aspek *engineering* dibandingkan model manajemen seperti Scrum. Berbeda dengan pengembangan aplikasi pengaduan seperti HiCare yang menggunakan SDLC standar, penggunaan XP di sini memberikan fleksibilitas tinggi dalam memetakan enam bentuk kekerasan baru sesuai Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Selain itu, studi ini melampaui pengujian blackbox konvensional dengan mengintegrasikan Performance Testing melalui Apache JMeter untuk menjamin stabilitas sistem dengan rata-rata waktu respon 248 milidetik dan tingkat keberhasilan 90% dengan latensi rendah, yang menjadi keunggulan teknis dibandingkan platform pengaduan serupa.[8]. Serta System Integration Testing (SIT) untuk mengevaluasi fungsionalitas perangkat lunak yang saling terintegrasi agar beroperasi dengan baik. Terakhir, Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) dilakukan dengan menyesuaikan harapan dan kebutuhan pengguna akhir terhadap sistem.[9]

III. PEMBAHASA DAN HASIL

Sistem mengintegrasikan tiga pilar utama Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: pencegahan melalui



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2408

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

modul edukasi, pengaduan anonim, dan penanganan kasus yang terstruktur. Pencegahan terhadap kekerasan seksual di area kampus adalah tanggung jawab dari SATGAS PPKPT yang dikelola oleh sejumlah anggota Satgas yang memiliki tanggung jawab untuk mengunggah poster, informasi, dan prosedur pelaporan insiden melalui situs web. Pengaduan kekerasan seksual merupakan fitur website yang dapat digunakan oleh siapa saja yang merupakan korban dari kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Pada Figure 1 pengaduan dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website. Setelah login korban dapat menuliskan dan menceritakan detail kejadian yang dialami. Akun dan data korban terjamin oleh organisasi ini dan tidak disebarluaskan[6]. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan tugas dari SATGAS PPKPT yang ditangani oleh beberapa staff khusus Satgas yang mempunyai peran untuk melakukan survei dan menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual terhadap korban. Penanganan dilakukan melalui masuknya laporan dari website kemudian oleh petugas akan memvalidasi data korban dan pelaku. Setelah validasi data petugas akan melakukan survei dan segera menindaklanjuti pelaku yang bersangkutan.[5]

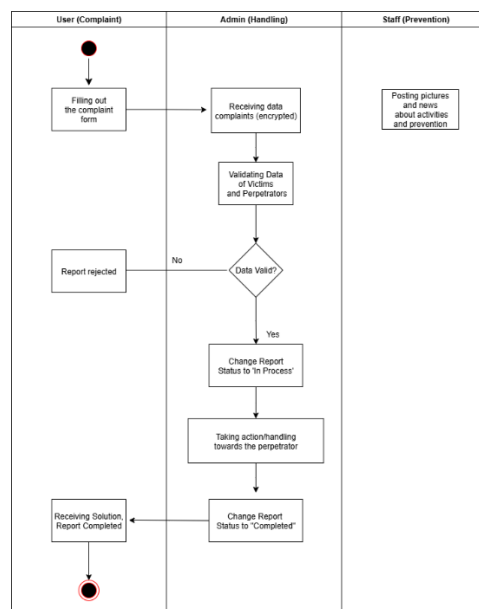


Figure 1 Business Process System

Dalam pembangunan perisian, model dan bahasa yang konsisten sangat penting untuk pemodelan sistem. Pemodelan yang dirujuk di sini adalah Bahasa Pemodelan(UML).[6]. Dalam situasi ini, penulis menyusun model sistem yang mencakup diagram usecase, diagram kelas, diagram aktivitas, sequence diagram dan deployment diagram.[10]



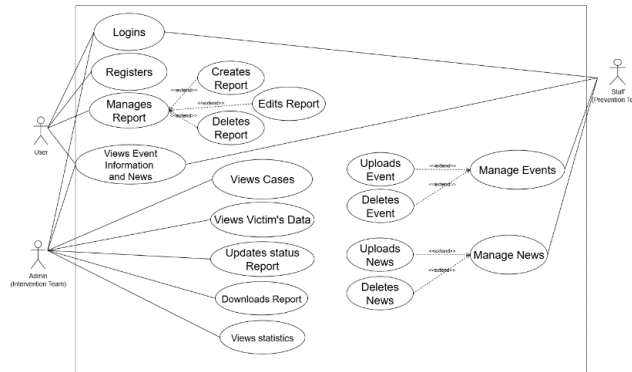


Figure 2 Use Case Diagram

Pada *Figure 2* Use case diagram pada sistem pengaduan Satgas PPKPT menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama, yaitu User, Admin (Tim Penanganan), dan Staff (Tim Pencegahan) dengan berbagai fungsi yang tersedia dalam sistem[6][10]. User berperan sebagai pelapor yang dapat melakukan registrasi, login, serta mengelola pengaduan dengan membuat, mengedit, maupun menghapus laporan. Selain itu, User juga dapat mengakses informasi kegiatan dan berita yang dipublikasikan sebagai bentuk transparansi dan penyebaran informasi preventif[1][2]. Sementara itu, Admin memiliki kewenangan yang lebih luas, mencakup pengelolaan data kasus dan pelapor, pembaruan status pengaduan, pengunduhan laporan, serta penyajian ringkasan statistik yang berfungsi untuk pemantauan dan evaluasi. Admin juga mendukung komunikasi publik melalui pengelolaan berita dan informasi kegiatan.

Di sisi lain, Staf fokus pada elemen pencegahan dengan mengunggah, menghapus, dan memperbarui informasi kegiatan, serta berpartisipasi dalam mengelola berita yang berhubungan dengan sosialisasi dan edukasi. Relasi yang terdapat pada diagram menyoroti fungsi yang wajib, yang merupakan bagian dari fitur utama, sementara relasi tambahan menunjukkan fitur tambahan yang bersifat opsional. Secara keseluruhan, model ini menunjukkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pelapor, tim penanganan, dan tim pencegahan, sehingga sistem dapat beroperasi secara komprehensif, terintegrasi, dan terstruktur dalam mendukung upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dari diagram use case yang telah disebutkan, maka dapat disusun tabel berikut:

Tabel 1 Manage Report

<i>Use Case Name</i>	:	Manages Reports
<i>Use Case Description</i>	:	User enable to create, edit, and delete report
<i>Actors</i>	:	User
<i>Pre-Condition</i>	:	1. Connected to Internet 2. Logged In
<i>Post-Condition</i>	:	Report has been created/edited/deleted
<i>Extended Use Cases</i>	:	1. Creates Report 2. Edits Report 3. Deletes Report
<i>Fault Condition</i>	:	Failed to create/edit/delete report
<i>Main Scenarios</i>	<i>Serial No.</i>	<i>Step</i>
User	1	User has been logged in
	2	User determine actions : Create, Edit, Delete
	3	System executes action



	4	System send notification of action
Extensions	2a	User enable to do report more than once
	2b	User disable to do change report status

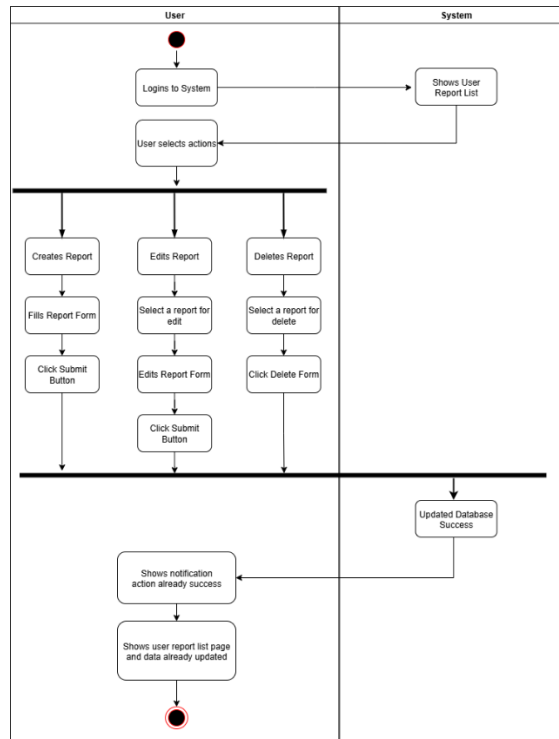


Figure 3 Activity Diagram Manage Report

Figure 3 menggambarkan alur kerja dinamis aktor User dalam mengelola pelaporan kekerasan pada sistem Satgas PPKPT yang dikembangkan dengan metode Extreme Programming. Alur dimulai dengan prasyarat bahwa User harus terhubung ke internet dan telah melakukan login untuk mengakses halaman utama, di mana sistem kemudian memberikan pilihan aksi berupa pembuatan (create), pengeditan (edit), atau penghapusan (delete) laporan. Dalam proses pembuatan laporan, User mengisi detail kronologi kejadian yang akan diproses oleh sistem melalui fungsi `add_kasus()` dan disimpan ke dalam basis data MySQL. Pada tahap pengeditan, User dapat memperbarui data laporan miliknya melalui fungsi `edit_kasus_user()`, namun sistem memberlakukan batasan ketat di mana User tidak diizinkan mengubah status laporan karena otoritas tersebut sepenuhnya milik Admin. Jika User memilih untuk menghapus laporan, sistem akan menjalankan fungsi `menghapus_data_id()` untuk menghilangkan rekaman data secara permanen dari server. Seluruh rangkaian aktivitas ini diakhiri dengan pengiriman notifikasi keberhasilan oleh sistem dan pembaruan tampilan daftar laporan, memastikan proses manajemen pengaduan berjalan secara terstruktur dan terintegrasi antara antarmuka pengguna dengan logika bisnis berbasis framework CodeIgniter.[11]



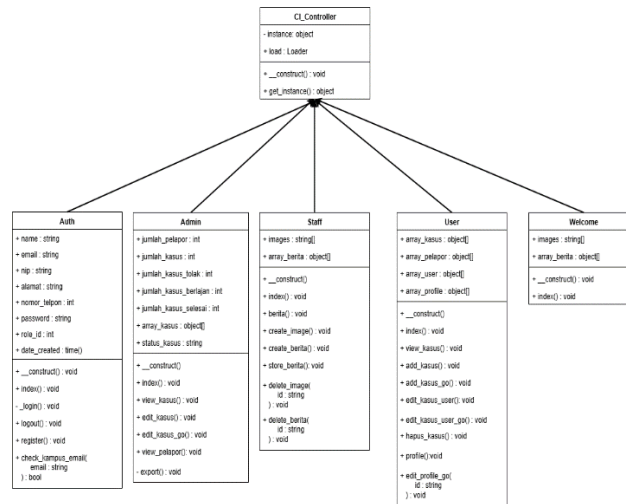


Figure 4 CI Controller Class Diagram

Figure 4 menampilkan diagram kelas dalam sistem pengaduan Satgas PPKPT dirancang dengan pendekatan Model-View-Controller (MVC) yang berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pengembangan aplikasi menggunakan CodeIgniter. Di bagian pengendali, terdapat kelas Auth, Admin, Staff, User, dan Welcome yang masing-masing memiliki tanggung jawab dalam mengelola logika bisnis sesuai dengan peran aktor, mulai dari otentikasi pengguna, pemrosesan data laporan, hingga pengelolaan berita dan profil. Semua pengendali tersebut bernaung di bawah CI_Controller yang bertugas sebagai kerangka utama.

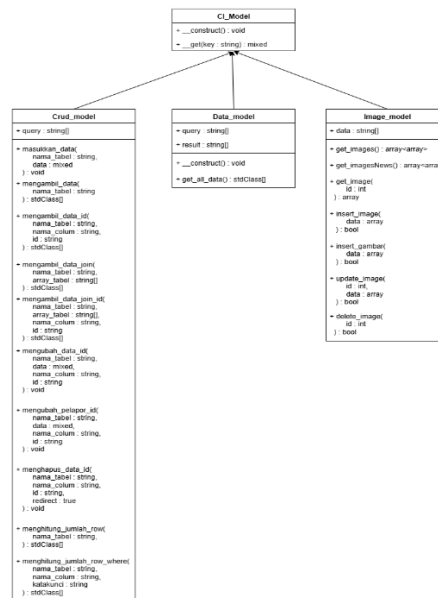


Figure 5 CI Model Class Diagram

Sementara itu pada Figure 5 menampilkan komponen dalam model yang terdiri dari Crud_model, Data_model, dan Image_model yang berasal dari CI_Model. Ketiga model itu memiliki fungsi dalam pengelolaan informasi, termasuk operasi dasar *query*, pengambilan data untuk keperluan analisis, serta pengolahan gambar yang berhubungan dengan bukti atau dokumen kasus. Keterkaitan antar kelas dalam diagram ini menunjukkan



penggabungan yang solid antara pengaturan logika bisnis dan pengelolaan data, sehingga sistem memiliki struktur yang modular, teratur, serta mudah untuk dikembangkan dan dirawat.

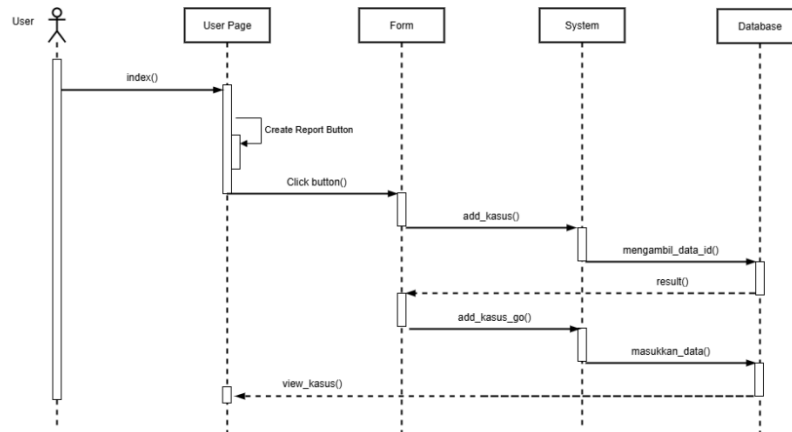


Figure 6 Sequence Diagram User Crates Report

Figure 6 Sequence Diagram User Creates Report tersebut menggambarkan proses interaksi yang terjadi antara Pengguna, antarmuka (Halaman Pengguna dan Formulir), sistem, serta basis data saat membuat pengaduan. Pertama, Pengguna masuk ke halaman utama (index) dan menekan tombol Buat Laporan pada Halaman Pengguna. Tindakan ini memicu pemanggilan fungsi `add_kasus()` melalui Formulir yang kemudian diteruskan ke sistem. Sistem selanjutnya berinteraksi dengan basis data melalui fungsi `ambil_data_id()` untuk memperoleh identitas kasus, dan setelah menerima hasil, sistem akan menjalankan fungsi `simpan_data()` untuk menyimpan laporan baru ke dalam basis data. Selanjutnya, Formulir juga memanggil fungsi `add_kasus_go()` untuk melanjutkan proses penyimpanan. Setelah data berhasil ditambahkan, pengguna dapat mengakses laporan tersebut kembali melalui fungsi `lihat_kasus()`. Dengan demikian, diagram ini menegaskan bahwa proses pengaduan dilakukan dengan langkah-langkah yang terstruktur, termasuk validasi, pemrosesan, dan penyimpanan data secara terpadu antara antarmuka, sistem, dan basis data.

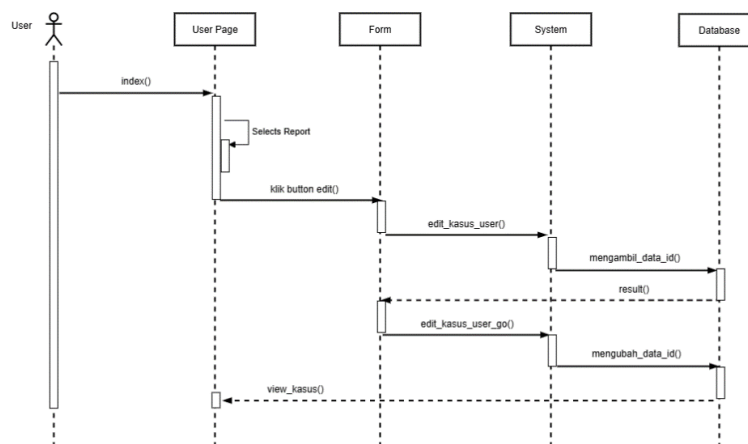


Figure 7 Sequence Diagram User Edits Report

Figure 7 Sequence Diagram User Edits Report ini menggambarkan proses pengeditan laporan pengaduan oleh User. Alur dimulai dari pemilihan laporan pada halaman pengguna dan menekan tombol edit, yang memicu



pemanggilan fungsi `edit_kasus_user()`. Sistem kemudian mengambil data terkait dari basis data melalui fungsi `mengambil_data_id()` dan mengembalikan hasilnya. Setelah perubahan dilakukan, sistem menjalankan `edit_kasus_user_go()` untuk menyimpan pembaruan melalui fungsi `mengubah_data_id()`. Terakhir, pengguna dapat menampilkan kembali laporan yang telah diperbarui dengan `view_kasus()`. Proses ini menunjukkan mekanisme pengeditan data yang terintegrasi antara antarmuka, sistem, dan basis data

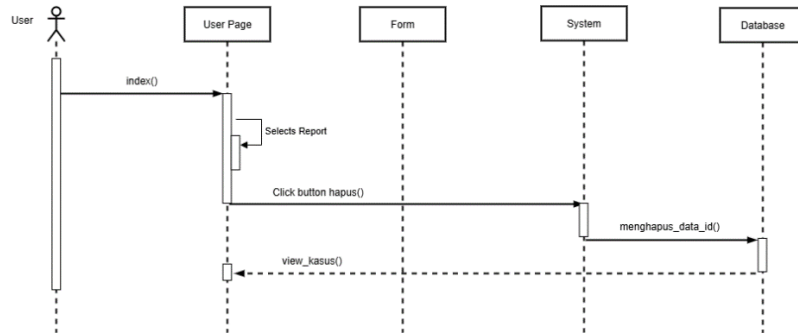


Figure 8 Sequence Diagram User Deletes Report

Sequence diagram ini menggambarkan langkah-langkah penghapusan laporan keluhan oleh Pengguna. Begitu laporan dipilih di halaman pengguna dan tombol hapus ditekan, sistem akan melakukan fungsi `hapus_data_id()` untuk menghilangkan data dari database. Setelah itu, pengguna bisa kembali melihat daftar laporan melalui `view_kasus()`. Proses ini menegaskan alur penghapusan data yang mudah, tetapi tetap terhubung antara antarmuka, sistem, dan database.

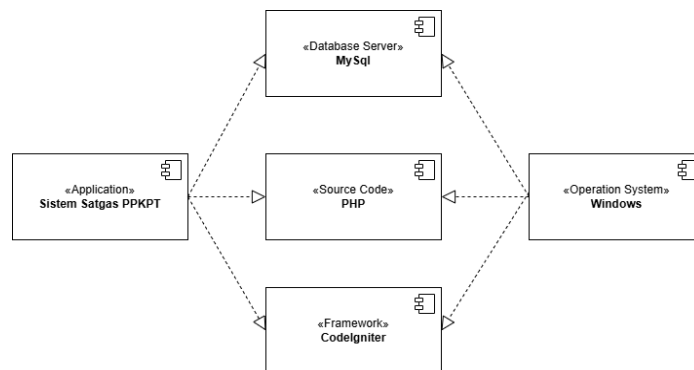


Figure 9 Component Diagram

Figure 9 Component Diagram merupakan desain Komponen Diagram dari sistem yang akan dikembangkan. Bahasa pemrograman dan kerangka kerja yang diterapkan adalah satu kesatuan, sementara database memanfaatkan Mysql untuk meningkatkan efisiensi penggunaan server database dalam sistem.



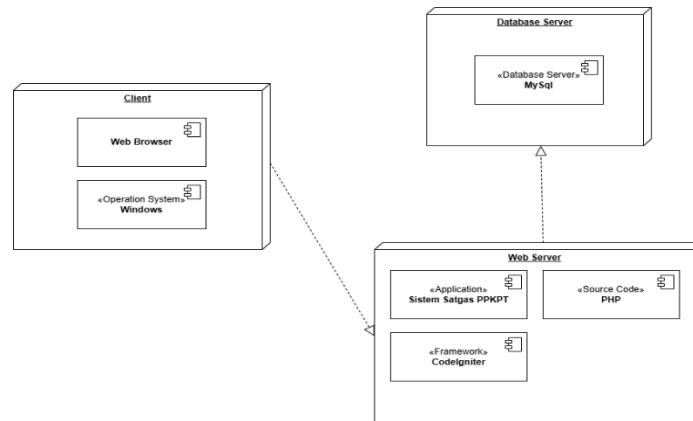


Figure 10 Deployment Diagram

Pada *Figure 10* deployment diagram dari website Satgas PPKPT digambarkan dimana client yang mengakses website dapat menggunakan web browser. Web server terdiri dari PHP dan melalui framework Codeigniter maka data akan dikirim kepada database server yaitu MySQL.

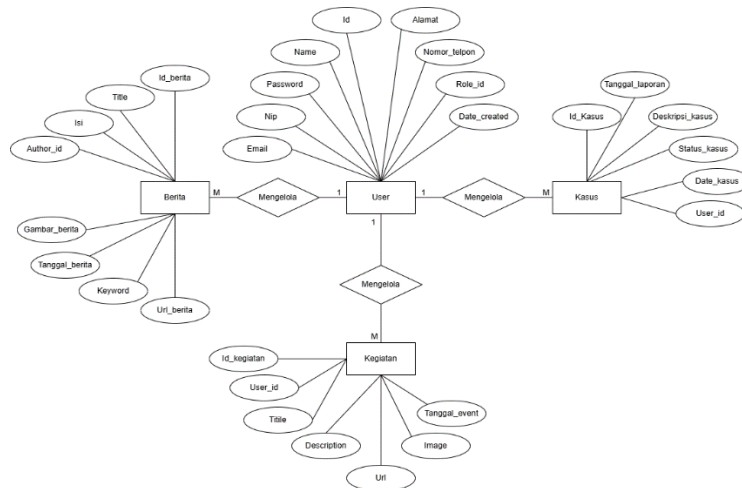


Figure 11 Entity Relation Diagram Model Chen's

Pada *Figure 11* mengilustrasikan bahwa program yang akan dibangun memiliki entitas dan relasi. Terlihat bahwa entitas User memiliki relasi ke semua tabel yaitu Mengelola. Relasi Mengelola dari entitas User ke Kasus mewakili fungsi add, edit, delete. Sedangkan relasi Mengelola dari User ke Berita maupun ke entitas Kegiatan yaitu mewakili fungsi add dan delete. Dari entitas user tersebut memiliki atribut yaitu role_id yang berfungsi memvalidasi role seperti admin, user, dan staff. Pengujian Integrasi Sistem adalah proses untuk menilai berbagai perangkat lunak yang saling terhubung dan berfungsi dengan baik pada semua sistem. [12]. Dalam penelitian ini pengujian pada perangkat lunak dilakukan oleh seorang Quality Assurance.



Tabel 2 System Integration Testing User End-to-end

Field	Details
Test Case ID	SIT_001_USER_E2E_SUCCESS
Test Objective	UI Integration Validating, AuthService, and Database
Precondition	Email Account User 'ramadhani@nusamandiri.ac.id' not exist
Test Data	<ol style="list-style-type: none"> Input Data Register : Nama Lengkap : Utami Ramadhani NIM : 12230132 Email : utami@nusamandiri.ac.id Alamat : Jakarta Timur No Hp/Tlp : 089911223344 Password : 123123 Input Date Of Event : 19 Juli 2025 Input Case Description : Sexual Harassment in the Classroom by a Classmate
Test Step	<ol style="list-style-type: none"> Access www.ppkptnusamandiri.revolusie.com Click Login/Signup Click Daftar Input Valid Data Register Click Daftar Input Login Click Create Report Input Date Report Input Case Description Click Button Submit Logout
System Interfaced Tested	<ol style="list-style-type: none"> Website Frontend UI Database
Expected Result	<ol style="list-style-type: none"> Web direct to Form Login Data updated to database
Pass Criteria	<ol style="list-style-type: none"> Respond Success
Error Handling	<ol style="list-style-type: none"> Not running error handling

User Acceptance Testing adalah pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi sebuah perangkat lunak dalam hal ekspektasi dan kepuasan user atau klien.



Tabel 3 User Acceptance Testing



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2408

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

No	Use Case	Test Condition	Test Case Description	Steps	Steps Description	Expected Result
5	Creates report or case	Normal	Do create report or case	1	Access www.ppkptnusamandiri.r-evolusie.com	Access PPKPT Task force website success
				2	Login as user	Login success, user page appears
				3	Click button for create report	Create report page appears
				4	Input Report Data: Accident Date : 06/10/2025 Case Description : Verbally humiliated by one of the final year students of the Computer Science program, in front of the classroom on the 3rd floor of the Kramat building.	Data inputs success
				5	Click Submit button	Created report success, Case lists page appears.
6	Edits report or cases	Normal	Do edit report or case	1	Access www.ppkptnusamandiri.r-evolusie.com	Access PPKPT Task force website success
				2	Login as user	Login success, user page appears
				3	Click Edit button at least one report	Edit report pages appears
				4	Input Report Data: Accident Date : 06/9/2025 Case Description : Verbally humiliated by one of the final year students of the Computer Science program, in front of the classroom on the 2 nd floor of the Kramat building	Data inputs success



				5	Click edits button	Edit report success, Case lists page appears
7	Delete report or case	Normal	Do Deletes report or case	1	Access www.ppkptnusamandiri.r evolusie.com	Access PPKPT Task force website success
				2	Login as user	Login success, user page appears
				3	Click delete button at least one report	Delete report success, Case lists page appears

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merancang aplikasi Satgas PPKPT pertama di Universitas Nusa Mandiri yang sesuai dengan standar Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024. Penerapan metode Extreme Programming (XP) memberikan fleksibilitas dalam memetakan berbagai bentuk kekerasan baru secara efisien. Sistem terbukti efektif secara fungsional melalui pengujian UAT dan memiliki stabilitas performa dengan tingkat keberhasilan 90% serta rata-rata waktu respon 248 milidetik. Kontribusi utama penelitian ini adalah penyediaan platform terintegrasi yang menjamin keamanan data pelapor sekaligus memfasilitasi koordinasi antara tim pencegahan dan penanganan. Sebagai pengembangan ke depan, integrasi verifikasi identitas otomatis dan pengembangan aplikasi berbasis mobile menjadi langkah penting untuk memperluas keterjangkauan layanan bagi seluruh civitas akademika

REFERENSI

- [1] Kemendikbudristek, *Penanganan, Pencegahan D A N Seksual, Kekerasan Lingkungan, D I Tinggi, Perguruan*. 2022.
- [2] N. Rahmansyah, I. Saripudin, and U. M. Bakti, "Journal justiciabellen (jj)," vol. 05, no. 02, pp. 102–115, 2025.
- [3] K. Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan," 2023.
- [4] M. Rifqi, Z. Rizqullah, and W. S. Utami, "Edumatic : Jurnal Pendidikan Informatika HiCare : Aplikasi Pengaduan Kekerasan Seksual berbasis Mobile," vol. 7, no. 2, pp. 396–405, 2023, doi: 10.29408/edumatic.v7i2.23228.
- [5] Mendikbudristek, "permendikbudristek no.55," pp. 1–43, 2024.
- [6] N. yudi Arifin.dkk, "Analisa perancangan sistem informasi.pdf," 2021.
- [7] S. A. Asma Akhtar, Birra Bakhtawar, "EXTREME PROGRAMMING VS SCRUM: A COMPARISON OF AGILE MODELS," vol. 2, no. 2, pp. 80–96, 2022.
- [8] D. I. Permatasari *et al.*, "Pengujian Aplikasi Menggunakan Metode Load Testing dengan Apache Jmeter pada Sistem Informasi Pertanian," vol. 8, no. 1, pp. 135–139, 2020.
- [9] S. G. Tetteh, "Software Testing Techniques and Levels in Software Development," vol. 2, no. 1, pp. 10–19, 2024, doi: 10.56472/25838628/IJACT-V2I1P102.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2408

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- [10] Setiaji.dkk, “IMPLEMENTASI MODEL UNIFIED MODELLING LANGUAGE(UML) PADA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI DATA KEPENDUDUAKN DAN BANTUAN SOSIAL,” 2024.
- [11] D. rosa anamisa & F. M. Ayu, *Dasar Pemrograman Web Teori & Implementasi*. 2020. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=-k2eEAAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- [12] S. Ashiq *et al.*, “Challenges and Barriers to Software Testing Shahzad,” vol. 13, no. 1, pp. 628–640, 2024.



DOI: 10.52362/jisamar.v10i2.2408

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).